

EFEKTIVITAS KEBIJAKAN PMBERDAYAAN PEREMPUAN DALAM MENGURANGI KETIMPANGAN GENDER DI INDONESIA

Natazha Putri Nuraini¹, Syafira Apriliansi Adhiyat², Indah Prabawati³, Firre An Suprpto⁴

^{1,2,3,4}Universitas Negeri Surabaya

Email : 25040674297@mhs.unesa.ac.id¹, 25040674294@mhs.unesa.ac.id²,
indahprabawati@unesa.ac.id³, firresuprpto@unesa.ac.id⁴

Abstrak

Ketimpangan gender di Indonesia masih menjadi tantangan nasional, perempuan dan laki laki belum semua punya kesempatan yang sama, ketimpangan dalam pendidikan, pekerjaan, penghasilan, dan jabatan ,meskipun berbagai kebijakan pemberdayaan perempuan telah diimplementasikan oleh pemerintah.pemerintah sudah membuat banyak kebijakan untuk membantu perempuan supaya punya hak yang sama. Penelitian ini bertujuan untuk melihat efektivitas kebijakan pemberdayaan perempuan untuk mengurangi ketimpangan gender di Indonesia, terutama di bidang pendidikan, ekonomi, kesehatan, dan partisipasi politik. Metode penelitian ini menggunakan cara analisis terhadap berbagai dokumen kebijakan, jurnal ilmiah, serta data statistik terkait kesenjangan gander. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pemberdayaan perempuan telah memberikan dampak positif, terutama dalam peningkatan akses pendidikan, partisipasi kerja perempuan, serta keterwakilan perempuan dalam lembaga politik. Namun, efektivitas kebijakan tersebut masih menghadapi berbagai kendala, seperti budaya patriarki, ketimpangan akses di wilayah pedesaan, rendahnya kualitas perlindungan hukum, serta dominasi perempuan di sektor informal dengan upah rendah. Oleh karena itu, diperlukan penguatan implementasi kebijakan melalui pendekatan yang lebih holistik, peningkatan pengawasan, penguatan kapasitas ekonomi perempuan, serta kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil.Dengan cara strategi yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan, kebijakan pemberdayaan perempuan diharapkan mampu secara signifikan mengurangi ketimpangan gender dan mendorong pembangunan yang inklusif di Indonesia.

Kata Kunci: Pemberdayaan Perempuan, Ketimpangan Gender, Kebijakan, Indonesia.

Abstract

Gender inequality in Indonesia is still a national challenge, women and men do not all have the same opportunities, such as inequality in education, employment, income, and position, although various women's empowerment policies have been implemented by the government. The government has made many policies to help women have equal rights. This study aims to see the effectiveness of women's empowerment policies to reduce gender inequality in Indonesia, especially in the fields of education, economics, health, and political participation. This research method uses an analysis of various policy documents, scientific journals, and statistical data related to gender inequality. The results of the study show that women's empowerment policies have had a positive impact, especially in increasing access to education, women's work participation, and women's representation in political institutions. However, the

effectiveness of these policies still faces various obstacles, such as patriarchal culture, unequal access in rural areas, low quality of legal protection, and the dominance of women in the informal sector with low wages. Therefore, it is necessary to strengthen policy implementation through a more holistic approach, increased oversight, strengthening women's economic capacity, and collaboration between the government, the private sector, and civil society. With a more integrated and sustainable strategy, women's empowerment policies are expected to significantly reduce gender inequality and promote inclusive development in Indonesia.

Keywords: *Women's Empowerment, Gender Inequality, Policy, Indonesia.*

PENDAHULUAN

Pembangunan yang berkelanjutan menuntut adanya keterlibatan seluruh lapisan masyarakat tanpa membedakan gender. Perempuan sebagai bagian penting dari sumber daya manusia memiliki potensi besar dalam mendukung pembangunan ekonomi, sosial, dan politik. Namun, dalam praktiknya perempuan di Indonesia masih menghadapi berbagai bentuk ketimpangan gender yang membatasi partisipasi mereka dalam berbagai sektor kehidupan. Kesenjangan tersebut dapat dilihat dari rendahnya tingkat partisipasi perempuan dalam dunia kerja, keterbatasan akses terhadap sumber daya ekonomi, serta masih rendahnya keterwakilan perempuan dalam proses pengambilan keputusan di ruang publik. Kondisi ini menunjukkan bahwa perempuan belum sepenuhnya memperoleh kesempatan yang setara dibandingkan laki-laki dalam pembangunan. Pemerintah Indonesia sebenarnya telah mengeluarkan

berbagai kebijakan untuk mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, seperti program peningkatan kapasitas perempuan, pengembangan kewirausahaan perempuan, serta kebijakan pengarusutamaan gender dalam pembangunan. Secara normatif, kebijakan tersebut bertujuan untuk memberikan kesempatan yang sama bagi perempuan dalam mengakses pendidikan, pekerjaan, serta partisipasi dalam pengambilan keputusan. Namun, pada kenyataannya masih terdapat kesenjangan antara tujuan kebijakan dengan kondisi yang terjadi di masyarakat. Data di berbagai sektor menunjukkan bahwa partisipasi perempuan dalam bidang ekonomi dan politik masih relatif rendah, sementara diskriminasi gender dan keterbatasan akses terhadap sumber daya masih sering terjadi. Hal ini menunjukkan adanya gap antara harapan yang ingin dicapai melalui

kebijakan pemberdayaan perempuan dengan realitas di lapangan.

Permasalahan tersebut tidak hanya berdampak pada perempuan secara individu, tetapi juga berpengaruh terhadap kualitas pembangunan secara keseluruhan. Ketika perempuan tidak memiliki kesempatan yang setara untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi dan sosial, maka potensi sumber daya manusia tidak dapat dimanfaatkan secara optimal. Oleh karena itu, ketimpangan gender menjadi salah satu public problem yang perlu mendapatkan perhatian serius dari pemerintah. Intervensi kebijakan sangat diperlukan untuk memastikan bahwa perempuan memperoleh akses yang setara terhadap berbagai peluang pembangunan, sekaligus untuk mendorong terciptanya pembangunan yang lebih inklusif dan berkeadilan. Dengan melihat latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana formulasi kebijakan pemberdayaan perempuan yang diterapkan dalam upaya mengurangi ketimpangan gender di Indonesia.
2. Bagaimana implementasi kebijakan tersebut dalam praktiknya serta sejauh mana kebijakan tersebut mampu menjawab permasalahan ketimpangan gender yang terjadi di masyarakat.

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis formulasi dan implementasi kebijakan pemberdayaan perempuan dalam mengurangi ketimpangan gender di Indonesia, serta mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan maupun hambatan dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Melalui penelitian ini diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai efektivitas kebijakan pemberdayaan perempuan sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan yang lebih tepat dan responsif terhadap permasalahan kesetaraan gender di Indonesia.

TINJAUAN PUSTAKA

• Ketimpangan Gender

Ketimpangan gender merupakan kondisi dimana terdapat perbedaan perlakuan atau kesempatan antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai bidang kehidupan. Ketimpangan ini dapat terlihat dari perbedaan akses terhadap pendidikan, kesempatan kerja, pendapatan, serta partisipasi dalam pengambilan keputusan. Di Indonesia, ketimpangan gender masih menjadi permasalahan yang cukup serius. Hal ini terlihat dari masih rendahnya partisipasi perempuan dalam

dunia kerja, keterbatasan kesempatan dalam kepemimpinan, serta adanya stereotip sosial yang menempatkan perempuan hanya pada peran domestik. Kondisi ini menyebabkan perempuan seringkali tidak memiliki kesempatan yang sama dalam mengembangkan potensi mereka. Ketimpangan gender tidak hanya merugikan perempuan, tetapi juga dapat menghambat proses pembangunan suatu negara. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang dapat mendorong kesetaraan gender melalui berbagai program pemberdayaan perempuan.

- **Teori Implementasi Kebijakan menurut George Edward III**

Dalam menganalisis efektivitas kebijakan pemberdayaan perempuan, salah satu teori yang dapat digunakan adalah teori implementasi kebijakan dari George Edward III. Menurut Edward III, keberhasilan implementasi suatu kebijakan dipengaruhi oleh empat faktor utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Komunikasi berkaitan dengan bagaimana informasi mengenai kebijakan disampaikan kepada pelaksana kebijakan maupun kepada masyarakat. Jika komunikasi tidak berjalan dengan baik, maka kebijakan akan sulit dipahami dan

dilaksanakan secara optimal. Sumber daya berkaitan dengan

ketersediaan tenaga kerja, anggaran, serta fasilitas yang diperlukan untuk menjalankan kebijakan. Tanpa adanya sumber daya yang cukup, kebijakan yang telah dirumuskan tidak akan dapat berjalan dengan baik. Disposisi berkaitan dengan sikap dan komitmen para pelaksana kebijakan dalam menjalankan program yang telah ditetapkan. Jika pelaksana kebijakan memiliki komitmen yang kuat, maka kebijakan tersebut akan lebih mudah untuk dilaksanakan. Struktur birokrasi berkaitan dengan sistem organisasi dan prosedur yang mengatur pelaksanaan kebijakan. Struktur birokrasi yang jelas akan membantu pelaksanaan kebijakan menjadi lebih terarah dan efektif.

- **Teori Implementasi Kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn**

Selain teori Edward III, implementasi kebijakan juga dapat dianalisis menggunakan teori Van Meter dan Van Horn. Menurut mereka, keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh beberapa faktor penting yang saling berkaitan. Pertama adalah standar dan tujuan kebijakan. Kebijakan harus memiliki tujuan yang jelas agar pelaksana kebijakan dapat memahami apa

yang ingin dicapai dari kebijakan tersebut. Kedua adalah sumber daya yang tersedia. Sumber daya seperti tenaga kerja, anggaran, dan fasilitas sangat memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Ketiga adalah komunikasi antar organisasi yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan. Koordinasi yang baik antara lembaga pemerintah sangat penting agar kebijakan dapat berjalan secara efektif. Keempat adalah karakteristik organisasi pelaksana. Setiap organisasi memiliki struktur dan budaya kerja yang berbeda, sehingga hal ini juga dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Kelima adalah kondisi sosial, ekonomi, dan politik yang ada di masyarakat. Kondisi lingkungan tersebut dapat mendukung ataupun menghambat pelaksanaan kebijakan. Keenam adalah sikap pelaksana kebijakan terhadap kebijakan yang dijalankan. Sikap yang positif akan mempermudah proses implementasi kebijakan. Hubungan Kebijakan Pemberdayaan Perempuan dengan Pengurangan Ketimpangan Gender. Kebijakan pemberdayaan perempuan memiliki peran yang sangat penting dalam mengurangi ketimpangan gender. Melalui berbagai program seperti pelatihan keterampilan, peningkatan keses pendidikan,

serta pemberdayaan ekonomi, perempuan dapat memperoleh kesempatan yang lebih besar untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Ketika perempuan memiliki akses terhadap pendidikan dan peluang ekonomi yang lebih baik, mereka dapat berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga serta pembangunan ekonomi masyarakat namun dalam pelaksanaannya kebijakan pemberdayaan perempuan masih menghadapi berbagai tantangan seperti norma budaya, keterbatasan sumber daya, serta kurangnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya kesetaraan gender. Oleh karena itu, diperlukan implementasi kebijakan yang efektif agar program pemberdayaan perempuan benar-benar dapat mengurangi ketimpangan gender di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur (library research). Sumber data diperoleh dari artikel ilmiah yang membahas pemberdayaan perempuan di era digital, partisipasi perempuan dalam sektor teknologi, serta hambatan struktural dalam kebijakan gender di Indonesia.

Tahapan penelitian meliputi:

- **Identifikasi Literatur**

Menyeleksi artikel ilmiah yang relevan dengan tema efektivitas kebijakan pemberdayaan perempuan.

- **Analisis Isi (Content Analysis)**

Mengkaji secara mendalam konsep, temuan, serta argumentasi yang disampaikan dalam masing-masing artikel.

- **Sintesis Teoretis**

Mengintegrasikan temuan empiris dengan teori kebijakan publik, pemberdayaan perempuan, dan implementasi kebijakan.

- **Evaluasi Kritis**

Menilai sejauh mana kebijakan pemberdayaan perempuan mampu mengurangi ketimpangan gender berdasarkan indikator efektivitas kebijakan.

Pendekatan ini memungkinkan analisis yang lebih komprehensif karena tidak hanya mendeskripsikan kebijakan, tetapi juga mengevaluasi efektivitasnya secara konseptual dan empiris.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil analisis terhadap tiga artikel jurnal yang membahas kebijakan pemberdayaan perempuan dan ketimpangan gender di Indonesia, ditemukan beberapa

temuan penting terkait implementasi kebijakan, faktor penghambat, serta dampak kebijakan terhadap upaya pengurangan ketimpangan gender. Untuk memudahkan analisis, hasil kajian literatur tersebut disajikan dalam tabel berikut.

No	Penulis/Tahun	Fokus Penelitian	Metode Penelitian	Temuan Utama
1.	Artikel Jurnal 1	Kebijakan Pemberdayaan Perempuan dalam Pembangunan	Studi literatur	Kebijakan pemberdayaan perempuan mampu meningkatkan partisipasi perempuan dalam pendidikan dan ekonomi, namun implementasinya masih menghadapi kendala budaya patriarki dan keterbatasan akses sumber daya.
2.	Artikel Jurnal 2	Peran Kebijakan Pemerintah dalam Mengurangi Ketimpangan Gender	Penelitian Kualitatif	Program pemberdayaan perempuan memberikan peluang bagi perempuan untuk meningkatkan kapasitas
				ekonomi, tetapi masih terdapat kesenjangan antara kebijakan yang dirancang dengan pelaksanaannya di lapangan.
3.	Artikel Jurnal 3	Implementasi Kebijakan Kesetaraan Gender	Studi Kebijakan Publik	Implementasi kebijakan kesetaraan gender memerlukan koordinasi yang baik antar lembaga pemerintah serta dukungan masyarakat agar kebijakan dapat berjalan secara efektif.

- **Analisis Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Perempuan**

Berdasarkan hasil kajian terhadap ketiga artikel tersebut, dapat diketahui bahwa kebijakan pemberdayaan perempuan di Indonesia telah memberikan kontribusi terhadap upaya mengurangi ketimpangan gender. Kebijakan tersebut diwujudkan melalui berbagai program seperti peningkatan akses pendidikan bagi perempuan, pengembangan kewirausahaan perempuan, serta peningkatan partisipasi perempuan dalam kegiatan sosial dan politik.

Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan tersebut masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu faktor utama yang menjadi hambatan adalah masih kuatnya budaya patriarki dalam masyarakat. Dalam beberapa daerah, perempuan masih

dianggap memiliki peran utama dalam ranah domestik sehingga kesempatan mereka untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi dan politik menjadi terbatas.

Selain itu, keterbatasan akses terhadap sumber daya juga menjadi faktor yang mempengaruhi keberhasilan kebijakan pemberdayaan perempuan. Banyak perempuan, terutama yang berada di wilayah pedesaan, masih mengalami

kesulitan dalam memperoleh akses terhadap pendidikan, pelatihan keterampilan, maupun modal usaha. Kondisi ini menyebabkan program pemberdayaan yang telah dirancang oleh pemerintah belum sepenuhnya mampu menjangkau seluruh kelompok perempuan yang membutuhkan.

- **Analisis Berdasarkan Teori Implementasi Kebijakan**

Jika dianalisis menggunakan teori implementasi kebijakan dari George Edward III, keberhasilan kebijakan pemberdayaan perempuan dipengaruhi oleh beberapa faktor penting, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi.

Pertama, dari aspek komunikasi, proses sosialisasi kebijakan kepada masyarakat masih belum merata. Banyak perempuan yang belum mengetahui adanya program pemberdayaan yang dapat mereka manfaatkan. Hal ini menunjukkan bahwa proses penyampaian informasi mengenai kebijakan masih perlu ditingkatkan.

Kedua, dari aspek sumber daya, keterbatasan anggaran dan tenaga pelaksana sering kali menjadi kendala dalam pelaksanaan program pemberdayaan perempuan. Tanpa

dukungan sumber daya yang memadai, program yang telah dirancang oleh pemerintah sulit untuk dilaksanakan secara optimal.

Ketiga, dari aspek disposisi atau sikap pelaksana kebijakan, komitmen aparat pemerintah dalam mendukung kesetaraan gender juga mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Apabila pelaksana kebijakan memiliki pemahaman yang baik mengenai pentingnya pemberdayaan perempuan, maka program yang dijalankan akan lebih efektif.

Keempat, dari aspek struktur birokrasi, koordinasi antar lembaga pemerintah masih perlu diperkuat. Kebijakan pemberdayaan perempuan melibatkan berbagai instansi pemerintah, sehingga diperlukan kerja sama yang baik agar program yang dilaksanakan dapat berjalan secara terintegrasi.

• **Dampak Kebijakan terhadap Pengurangan Ketimpangan Gender**

Meskipun masih menghadapi berbagai tantangan, kebijakan pemberdayaan perempuan telah memberikan dampak positif dalam beberapa aspek pembangunan. Salah satu dampak yang cukup terlihat adalah meningkatnya akses perempuan terhadap pendidikan dan peluang ekonomi.

Perempuan yang memiliki akses pendidikan yang lebih baik cenderung

memiliki peluang kerja yang lebih luas dan mampu meningkatkan kesejahteraan keluarga. Selain itu, keterlibatan perempuan dalam kegiatan ekonomi seperti usaha kecil dan menengah juga memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi lokal.

Di bidang politik, kebijakan kuota keterwakilan perempuan juga telah memberikan peluang bagi perempuan untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Kehadiran perempuan dalam lembaga politik diharapkan dapat mendorong lahirnya kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan perempuan dan kelompok rentan lainnya.

Namun demikian, untuk mencapai kesetaraan gender yang lebih optimal, diperlukan upaya yang lebih komprehensif dan berkelanjutan dalam implementasi kebijakan pemberdayaan perempuan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan melalui studi literatur, dapat disimpulkan bahwa kebijakan pemberdayaan perempuan merupakan salah satu strategi penting dalam upaya mengurangi ketimpangan gender di Indonesia. Pemerintah telah mengeluarkan

berbagai kebijakan dan program yang bertujuan untuk meningkatkan akses perempuan terhadap pendidikan, kesempatan kerja, serta partisipasi dalam kehidupan sosial dan politik.

Kebijakan tersebut telah memberikan dampak positif dalam beberapa aspek, seperti meningkatnya tingkat pendidikan perempuan, bertambahnya jumlah perempuan yang terlibat dalam kegiatan ekonomi, serta meningkatnya keterwakilan perempuan dalam lembaga politik. Namun demikian, efektivitas kebijakan tersebut masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan sumber daya, kurangnya koordinasi antar lembaga, serta masih kuatnya norma sosial dan budaya patriarki dalam masyarakat. Selain itu, masih terdapat kesenjangan antara tujuan kebijakan dengan implementasinya di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih komprehensif dan berkelanjutan agar kebijakan pemberdayaan perempuan dapat benar-benar memberikan dampak signifikan dalam mengurangi ketimpangan gender.

Recommendations

Based on the research results, there are several recommendations that can be done to increase the effectiveness of women empowerment policies in Indonesia.

First, the government needs to increase the socialization of women empowerment policies so that information about the available programs can reach the community more widely, especially women in rural areas.

Second, increasing support resources is very needed to ensure the successful implementation of policies. This includes increasing the budget, providing training facilities, and strengthening the capacity of human resources involved in the program.

Third, the government needs to strengthen coordination between agencies in the implementation of women empowerment policies so that the programs that are implemented can mutually support and have a more significant impact.

Fourth, it is necessary to carry out efforts to change the community's mindset through education and gender equality campaigns so that stereotypes that limit women's roles can be reduced in a step-by-step manner.

With the steps mentioned above, it is expected that women empowerment policies can run more effectively.

dalam mengurangi ketimpangan gender dan mendukung pembangunan yang lebih inklusif di Indonesia

DAFTAR PUSTAKA

- Edward III, George C. (1980). *Implementing Public Policy*. Washington DC: Congressional Quarterly Press.
- Van Meter, Donald S., & Van Horn, Carl E. (1975). *The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework*. *Administration & Society*.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2022). *Pembangunan Pemberdayaan Perempuan di Indonesia*